

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) dan upaya pengurangan kemiskinan merupakan isu utama dalam dinamika pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks tersebut, terdapat dua pendekatan pokok yang dijadikan dasar strategi pembangunan, yaitu: (1) peningkatan PNB melalui modernisasi alat produksi, pemanfaatan modal besar, dan penerapan teknologi serta (2) pengurangan kemiskinan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kemandirian masyarakat, dan pemerataan kekuasaan secara adil. Salah satu langkah yang relevan dalam agenda pembangunan ekonomi adalah mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat sering kali memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan sekadar mengejar pertumbuhan PNB.¹

Populasi masyarakat miskin di dunia kini diperkirakan telah melampaui satu miliar jiwa, dengan mayoritasnya terkonsentrasi di wilayah Afrika, Asia Pasifik, serta Amerika Latin.² Diperkirakan pula bahwa sekitar 80 persen penduduk miskin global berada di kawasan tersebut. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 27,54 juta jiwa atau 11,47% dari total penduduk sebanyak 248,8 juta orang yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, dapat disimpulkan

¹ Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, and Nun Harrieti, "Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan", *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022) 26–51.

² Triana Rachmaningsih and D S Priyarsono, "Ketahanan Pangan Di Kawasan Timur Indonesia (Food Security in Eastern Indonesia)," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 1 (2012): 1–18.

bahwa satu dari sembilan penduduk Indonesia hidup dalam kondisi kemiskinan.³

Oleh Karena itu Diperlukan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif serta berorientasi pada sasaran yang tepat guna meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti BLT, Raskin, dan KUR. Salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan memperkuat sektor UMKM, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat miskin namun memiliki potensi produktif.⁴

Melalui keberadaan UMKM, masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan baik sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja di sektor tersebut. Kondisi ini memungkinkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga persoalan pengangguran dapat diminimalkan. Selain itu, output produksi dapat meningkat bersamaan dengan naiknya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Secara keseluruhan, proses tersebut berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran strategis UMKM ini dapat dibuktikan melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 66 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,52% dibandingkan tahun tahun sebelumnya, 2021 diestimasi sekitar 65,5 juta unit, dengan 99,9% di antaranya adalah usaha mikro dan kecil. UMKM merupakan sektor yang dominan dalam struktur perekonomian nasional,

³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWgJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWwTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>

⁴ Eko Aristanto, "Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia," *Journal of Banking and Finance* 1, no. 1 (2019): 1–12.

dengan sumbangan mencapai 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁵

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dan telah banyak diakui. Namun demikian, para pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap modal usaha. Banyak di antara mereka yang masih bergantung pada pendanaan dari sumber pribadi, karena akses terhadap pembiayaan dari lembaga perbankan belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini muncul akibat sejumlah faktor, seperti minimnya pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit, kompleksitas proses administratif yang disertai dengan banyaknya persyaratan, serta kekhawatiran bahwa permohonan kredit yang diajukan tidak akan memenuhi standar kelayakan yang ditentukan oleh pihak perbankan.⁶

Selain itu, kesulitan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh kredit perbankan dipengaruhi oleh beberapa hal, ada 4 kendala utama untuk mendapat kredit UMKM yakni; 1) UMKM kerap dikategorikan sebagai *belum bankable*. Artinya, meskipun UMKM termasuk dalam kelompok usaha yang produktif, banyak di antaranya yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditetapkan lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh adanya standar prosedural pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh setiap pemohon. 2) Tidak adanya agunan yang dimiliki UMKM ketika mengajukan kredit. 3) tingkat literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah. Padahal, literasi keuangan merupakan kompetensi penting untuk mendukung kemampuan pengelolaan dan Perkembangan usaha. Rendahnya literasi keuangan menjadi faktor yang menghambat akses UMKM terhadap berbagai skema pembiayaan, sehingga menyulitkan mereka untuk berkembang dan bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih profesional. 4) proses dan prosedur

⁵ "<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html>"

⁶ Sulistyowati, "*Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi di Era Disrupsi*" 7, no. 2 (2023): 126–127.

pembiayaan yang dianggap kompleks turut menjadi penghambat. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme maupun persyaratan pengajuan pembiayaan, terutama bagi UMKM berbentuk non-individu. Pada UMKM jenis ini, kendala sering muncul akibat belum adanya kesepahaman di antara pengurus atau antara pengurus dan anggota. Selain itu, sering kali tidak ada pihak yang bersedia bertanggung jawab sebagai penanggung pinjaman, sehingga proses pengajuan kredit menjadi terhambat.⁷

Secara lebih rinci, permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Keterbatasan dalam mengakses dan memperluas pasar, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan sulit bersaing serta meningkatkan pangsa pasar; b) Kelemahan dalam permodalan, baik dari segi jumlah modal yang dimiliki maupun kesulitan dalam mendapatkan akses ke lembaga keuangan atau sumber pendanaan lainnya; c) Permasalahan dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk kurangnya kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang efektif; d) Terbatasnya jaringan kerja sama antar pelaku usaha kecil, khususnya dalam hal berbagi informasi, teknologi, dan strategi pemasaran; e) Lingkungan usaha yang belum mendukung, di mana tingkat persaingan yang ketat seringkali justru menimbulkan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan antar pelaku UMKM. Mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang mampu menyediakan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pada konteks ini, sektor UMKM memerlukan akses permodalan dari institusi keuangan guna mendorong Perkembangan usahanya serta menghindarkan mereka dari praktik pinjaman oleh pihak rentenir. Seiring perkembangannya, muncul berbagai lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan pembiayaan berskala mikro, baik yang

⁷ Indra Mualim Hasibuan and Marliyah, "Obstacles of Accessibility of Financing for Micro Smalland Medium Enterprises (MSMEs) from Financilal Institution," *Aksioma: Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024): 15–24.

beroperasi dengan sistem konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah⁸.

Lembaga lain yang turut berperan dalam penyediaan pembiayaan berskala mikro adalah perusahaan *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang beroperasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BMT menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai bentuk pembiayaan. Keberadaan BMT ditujukan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mendukung pertumbuhan dan Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masyarakat.⁹ Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pembiayaan dari *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) yakni antara lain: 1) Adanya fasilitas pembiayaan tanpa jaminan, 2) Menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat, 3) Proses pengajuan dan pencairan yang cepat, 4) Menyediakan solusi pembiayaan modal usaha yang mudah, adil, dan membawa maslahat bagi anggota, 5) Memungkinkan anggota untuk berbagi risiko usaha dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha, 6) Memungkinkan menyetujui pengajuan pembiayaan bagi pelaku usaha yang *bankable*.¹⁰

Dengan adanya kemudahan tersebut, bisa menjadi jawaban dari masalah pokok dalam Perkembangan kewirausahaan yang sudah disebutkan di atas. Melalui lembaga ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan untuk memulai maupun memperluas usahanya.

⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, purnada media (2021)

⁹ Evi Ainun Nai'ah, Dian Kusuma Wardani, dan Arivatu Ni'mati Rahmatika, *Strategi Penangann Pembiayaan Murabahah Bermasalah* (BMT NU Jombang), Cet. 1, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022), 1

¹⁰ BMT UGT Nusantara <https://bmtugtnusantara.co.id/pembiayaan> diakses pada Senin, 11 Mei 2026

Fasilitas tersebut sangat bermanfaat bagi UMKM rintisan (start-up) yang tidak mampu mengakses layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya karena tidak memiliki agunan yang dapat dijadikan jaminan, atau bagi mereka yang tercatat dalam daftar hitam dan kehilangan kepercayaan lembaga keuangan akibat riwayat wanprestasi yang terdeteksi melalui BI checking.

Di Indonesia, keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* didirikan sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi umat yang mengedepankan nilai ta'awun (tolong-menolong) serta asas kekeluargaan sebagaimana prinsip koperasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, BMT berpedoman pada syariat Islam. Kehadiran BMT berasal dari inisiatif masyarakat yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat dan memiliki kesepakatan bersama untuk mendirikan lembaga tersebut. Selain itu, sistem pembayaran yang sederhana dan tidak berbelit-belit menjadikan BMT banyak diminati oleh masyarakat secara luas. Jadi Perkembangan unit usaha berskala kecil berpotensi meningkat lebih cepat melalui dukungan BMT, karena skema ini tidak hanya menyediakan pembiayaan tetapi juga melibatkan perusahaan BMT sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dan Perkembangan usaha. BMT turut memberikan bimbingan manajerial, teknis, dan konsultasi bisnis untuk membantu usaha kecil meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Dengan demikian, tanggung jawab BMT tidak hanya sebatas pemberi dana, tetapi juga sebagai pembina dan pendorong pertumbuhan usaha kecil guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.¹¹

¹¹ Ryski Pebriana and Rofik Efendi, "Analisis Manajemen Pembiayaan Murobahah BMT," *Wadiah* 3, no. 1 (2019): 85–108.

Tabel 1. 1
Perkembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara
di indonesia

Tahun	Jumlah Kantor Cabang
2022	220
2023	240
2024	293
2025	298

Sumber: Data BMT UGT Nusantara

Berdasarkan tabel perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (UGT) Nusantara, dapat diketahui bahwa jumlah kantor cabang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah kantor cabang tercatat sebanyak 220 cabang. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 240 cabang, yang menunjukkan adanya penambahan sebanyak 20 cabang dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kantor cabang kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 293 cabang atau bertambah sebanyak 53 cabang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara terus melakukan Perkembangan jaringan pelayanan untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah kantor cabang kembali meningkat menjadi 298 cabang, meskipun kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya, yaitu hanya bertambah 5 cabang. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara mengalami perkembangan yang positif dan konsisten dalam memperluas jaringan kantor cabangnya di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan lembaga serta meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap layanan keuangan syariah yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara.¹²

Tabel 1. 2

Data Perbandingan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Kediri

No	Kantor	Alamat	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota
1	BMT UGT Nusantara Wates	Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.	2017	3930
2	BMT UGT Nusantara Mojo	Petok, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri,	2012	3633
3	BMT UGT Nusantara Grogol	Gringging Kidul, Kec. Grogol, Kab. Kediri	2021	1410

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara di BMT UGT Nusantara

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kantor cabang BMT UGT Nusantara yang berada di Kabupaten Kediri dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. BMT UGT Nusantara Capem Wates yang berlokasi di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, berdiri pada tahun 2017 dan memiliki jumlah anggota sebanyak 3.930 orang. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan dua kantor cabang lainnya. Selanjutnya, BMT UGT Nusantara Capem Mojo yang beralamat di Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, telah beroperasi sejak tahun 2012 dengan jumlah anggota sebanyak 3.633 orang. Meskipun merupakan kantor cabang yang lebih lama berdiri, jumlah anggotanya masih berada di bawah Capem Wates.

¹² Safitri Nurul Agustin and Nina Dwi Setyaningsih, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan BMT UGT Nusantara Capem Pare Sesuai PSAK 105," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 3 (2025): 1062–1079.

Sementara itu, BMT UGT Nusantara Capem Grogol yang berlokasi di Gringging Kidul, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, berdiri pada tahun 2021 dan memiliki jumlah anggota sebanyak 1.410 orang. Jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan kedua kantor cabang lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh usia operasional kantor yang relatif lebih baru. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Wates memiliki jumlah anggota terbanyak di antara ketiga kantor cabang yang dibandingkan, sehingga menunjukkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 1. 3

Data Perbandingan BMT UGT Nusantara, BMT NU dan BTM

Kantor	Alamat Lengkap	Tahun Berdiri	Produk	Jumlah Anggota	Harga
BTM Surya Melati Abadi	Jl. Raya Wonorejo, Dsn Beji, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates ,Kabupaten Kediri	2013	Produk simpanan diantaranya sebagai berikut: a. Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka (SIMUKA) b. Simpanan <i>Wadi'ah</i> c. Simpanan Idul Adha d. Simpanan Idul Fitri e. Simpanan Haji dan Umrah Sedangkan Produk Pembiayaanya: a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> b. Pembiayaan <i>Murabahah</i> c. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> d. Pembiayaan <i>Rahn</i>	1015	a. Simpanan pokok Rp:5.000 b. Simpanan wajib Rp: 5.000. c. Jangka waktu yang diberikan yaitu 24 bulan d. keuntungan (margin) adalah tawar menawar dengan rumusan presentase margin 1,7% - 2,5 %

BMT UGT Nusantara	Jl. Raya Tawang, Rt 019/Rw 08, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.	2017	Produk Simpanan diantaranya: a. Tabungan Umum Syariah b. Tabungan Haji c. Tabungan Umroh d. Tabungan Idul Fitri e. Tabungan Peduli Siswa f. Tabungan Qurban g. Simpanan Berjangka Produk Pembiayaan: a. UGT MUB (modal usaha barokah) b. UGT MTA (multiguna tanpa agunan) c. UGT KBB (kendaraan bermotor barokah) d. UGT PBE (pembelian barang elektronik) e. UGT PKH (pembiayaan kafalah haji) f. UGT MJB (multi jasa barokah) g. UGT MGB (multi griya barokah) h. UGT MPB (modal pertanian barokah) i. UGT PJE (pembiayaan jaminan emas) h. UGT PAT (pembiayaan agunan tunai)	3930	a. Simpanan pokok Rp: 10.000 b. Simpanan Wajib Rp: 10.000. c. Jangka waktu maksimal 48 bulan d. Keuntungan (margin) yaitu tawar menawar dengan rumusan presentase 1,5%- 2,5 % kalo bisa ditawarkan juga bisa turun.
BMT NU AlBarkah	Jl. Raya Wates, Rt 14/Rw 04 Desa Sumberagung, Kecamatan	2020	Produk simpanan diantaranya: a. Simpan Pinjam Syariah b. Simpanan umrah dan Haji	455	a. Simpanan pokok Rp: 10.000 b. Simpanan Wajib Rp: 5.000 c. Jangka waktu yang

	Wates, Kabupaten Kediri		c. Simpanan Idul Adha d. Simpanan Idul Fitri Produk Pembiayaan: a. Pembiayaan <i>Murabahah</i> b. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> c. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> d. Pembiayaan <i>Rahn</i>		diberikan 24 bulan. d. keuntungan (margin) tawar menawar dengan rumusan presentase 1,7%- 2,5%
--	-------------------------------	--	---	--	--

Sumber: Wawancara Karyawan dan Observasi Website BMT UGT , BMT NU dan
BTM Surya Abadi Melati

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat, yaitu BTM Surya Melati Abadi, BMT UGT Nusantara Capem Wates, dan BMT NU Al Barkah. Ketiga lembaga tersebut sama-sama menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan berbasis syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn. Selain itu, sistem penetapan margin yang diterapkan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dengan anggota sesuai prinsip syariah.

Meskipun memiliki produk yang relatif serupa, BMT UGT Nusantara Capem Wates memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Keunggulan tersebut terlihat dari variasi produk pembiayaan yang lebih lengkap, seperti UGT Modal Usaha Barokah (MUB), UGT Modal Pertanian Barokah (MPB), UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA), UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB), UGT Multi Jasa Barokah (MJB), hingga pembiayaan jaminan emas dan pembiayaan kafalah haji. Selain itu, BMT UGT Nusantara juga memberikan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang, yaitu hingga maksimal 48 bulan, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar

bagi anggota dalam mengembalikan pembiayaan sesuai kemampuan usahanya.

Dari sisi perkembangan kelembagaan, BMT UGT Nusantara Capem Wates juga memiliki jumlah anggota yang paling besar, yaitu sebanyak 3.930 anggota, jauh lebih tinggi dibandingkan BTM Surya Melati Abadi yang memiliki 1.015 anggota dan BMT NU Al Barkah yang memiliki 455 anggota. Jumlah anggota tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara. Di samping itu, besaran margin pembiayaan yang berkisar antara 1,5%–2,5% dengan sistem negosiasi memberikan kemudahan bagi anggota dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan berbagai keunggulan tersebut, BMT UGT Nusantara Capem Wates dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB). Produk pembiayaan ini secara khusus ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro memperoleh tambahan modal usaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, penjualan, dan aset usaha para anggotanya.¹³

Tbel 1. 4

Data Jumlah Pembiayaan Pada BMT UGT Nusantara Capem Wates

No	Jenis Prodak Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1	UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)	69
2	UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)	76
3	UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)	0
4	UGT MGB (Multi Griya Barokah)	68

¹³ Hasil Observasi di BMT UGT Nusantara, , BMT NU dan BTM Surya Abadi Melati Wates Kediri, 11 Mei 2026

5	UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)	300
6	UGT MJB (Multi Jasa Barokah)	103
7	UGT MUB (Modal Usaha Barokah)	330
8	UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)	325
9	UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)	86
10	UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)	0

Sumber: Wawancara BMT UGT Nusantara Capem Wates

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri memiliki berbagai produk pembiayaan dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. Produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah) memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu 330 anggota, diikuti UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) sebanyak 325 anggota dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) sebanyak 300 anggota. Sementara itu, produk UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai), dan UGT MGB (Multi Griya Barokah) memiliki jumlah anggota yang relatif lebih sedikit. Adapun produk UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) dan UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) belum memiliki anggota pembiayaan. Data tersebut menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang berorientasi pada permodalan usaha menjadi pilihan utama anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri.¹⁴

Pada Penelitian Alfian, M Rizqi (2025)¹⁵ menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha barokah yang diberikan oleh BMT berperan dalam membantu meningkatkan pendapatan usaha anggota, Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat celah penelitian berupa kurangnya kajian empiris secara lebih luas mengenai bagaimana pembiayaan modal usaha

¹⁴ Hasil Wawancara di BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri, 10 juli 2026

¹⁵ Widya Wahyu Lestari, *"Peran Pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (Studi kasus di BMT Jombang Cabang Bareng)"*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022)

barokah dari BMT berperan secara nyata dalam Perkembangan usaha mikro anggota. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif peran pembiayaan modal usaha barokah (UGT MUB) Terhadap Perkembangan usaha mikro anggota, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai peran pembiayaan modal usaha barokah (UGT MUB), dalam mendukung dan mendorong Perkembangan usaha mikro di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena lembaga keuangan non-bank, terutama lembaga *Baitul Maal wat Tamwil*, memiliki peran strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai kemitraan, keadilan, serta prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana Mekanisme pembiayaan modal usaha barokah dijalankan, dan bagaimana peran terhadap Perkembangan usaha mikro. Dengan fokus tersebut, maka penelitian skripsi ini diberi judul **PERAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAROKAH (UGT MUB) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates ?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates
2. Untuk Menganalisis Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan studi ini bisa menambah pengetahuan keilmuan yang membahas mengenai bagaimana Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Selain itu, Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur terkait Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berperan dalam memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB), khususnya terkait peran pendampingan usaha yang diberikan dalam mendorong perkembangan Usaha Mikro.

- b. Bagi Lembaga

Temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan serta sumber informasi yang konstruktif sehingga kontribusi pemikiran yang dihasilkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan / lembaga dalam Perkembangan usaha mikro pada masa mendatang.

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai perluasan wawasan, pengetahuan, dan informasi tambahan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan bisa memperkaya literatur terkait topik serupa serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga bisa digunakan sebagai pembanding bagi studi-studi berikutnya maupun bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

d. **Bagi Usaha Mikro**

Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman mengenai akses permodalan, kemudahan, serta bentuk pendampingan usaha yang disediakan oleh lembaga BMT UGT Nusantara Capem Wates.

E. Telaah Pustaka

1. **“Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah Di BMT UGT Nusantara Pare Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di Pasar Pamenang Pare.”**, yang di tulis oleh Alfian, M Rizqi (2025), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal usaha barokah mampu meningkatkan pendapatan nasabah yang mengembangkan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan peran BMT menjaga stabilitas pendapatan anggota yang bergerak di sektor UMKM melalui pembiayaan modal usaha barokah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tema pembahasan, yaitu sama-sama membahas produk pembiayaan modal usaha barokah, Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian , dimana penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan anggota, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada perkembangan usaha anggota.¹⁶
2. **“Peran Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kediri”**, yang di tulis oleh Tika Febriyanti, (2024) Penelitian ini menemukan bahwa produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

¹⁶ Alfian, M Rizqi , “Peran Pembiayaan Modal Usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Pare Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Pasar Pamenang Pare” (Kediri: UIN Kediri, 2026).

(MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Kediri diminati oleh pedagang pasar karena kemudahan persyaratan dan proses pengajuan yang sederhana, serta didukung oleh strategi pemasaran word of mouth. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan metode penelitian yakni menggunakan metode kualitatif, serta kesamaan fokus pada produk pembiayaan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada jenis produk yang dikaji, di mana penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), sedangkan penelitian ini berfokus pada pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB), serta pada fokus kajian yang lebih menekankan peran pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro.¹⁷

3. **“Peran Pengelolaan Dana Dari BMT UGT Nusantara Capem Mojo Guna Penguatan Modal Usaha (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**, yang di tulis oleh Sari Fifi Dyan (2025), Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji peran KSPPS BMT UGT Nusantara dalam mendukung pengembangan usaha UMKM melalui pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan dana untuk penguatan modal usaha di BMT UGT Nusantara Capem Mojo, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (UGT MUB) serta perannya terhadap perkembangan usaha mikro di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri.¹⁸
4. **“Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri)”**, yang di tulis oleh, Hana Fifi Dyan (2025), Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Pembiayaan Murabahah berperan Meningkatkan pendapatan

¹⁷ Tika Febriyanti, *“Peran Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kediri”* (Kediri: UIN Kediri, 2023).

¹⁸ Sari Fifi Dyan, *“Peran Pengelolaan Dana Dari BMT UGT Nusantara Capem Mojo Guna Penguatan Modal Usaha (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”* (Kediri: UIN Kediri, 2025).

para pelaku UMKM. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti pada BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan UMKM sedangkan penelitian kali ini berfokus pada Perkembangan UMKM.¹⁹

5. **“Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”**, yang ditulis oleh Husna Ikfi Nailal (2023), Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berperan Meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti pada BMT UGT Nusantara. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan UMKM sedangkan penelitian kali ini berfokus pada Perkembangan Usaha Mikro.²⁰

¹⁹ Hana Fifiana, *“Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates Kediri)”*, (Kediri: UIN Kediri, 2025).

²⁰ Husna Ikfi Nailal, *“Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri)”* (Kediri: UIN Kediri, 2023).